



## Tanah Asset Pemprov Jadi Temuan BPK

### Sekda Kalbar: Pak Midji juga Buat Sekolah dan Jalan di Situ

**PONTIANAK-RK.** Temuan BPK terkait asset Provinsi Kalbar yang berada di Kota Pontianak, tepatnya di Jalan Komyos Sudarso, Gang Lamtoro, Kecamatan Pontianak Barat. Walikota Pontianak, Sutarmidji menyatakan tak ambil pusing dan menyerahkan urusan tersebut kepada Pemerintah Provinsi Kalbar.

Lantaran tak mau ikut campur, meskipun keberadaan asset tersebut masih di kawasan Kota Pontianak. Bahkan, lahan seluas enam hektar itu dipergunakan masyarakat sebagai pemukiman.

Midji menegaskan, sejauh ini pihaknya sudah berbuat dengan melakukan penertiban bangunan liar di kawasan tersebut. Hanya saja, yang memiliki asset seakan tidak peduli dengan asset milik mereka sendiri.

"Itu urusan dia, (Pemprov, red) kita hanya membongkar bangunan yang tanpa izin dan sudah kita bongkar pasarnya. Pelihara tidak dipelihara itu urusan merekalah, tapi bahaya kalau diaudit," ucap Midji, di Aula Sultan Syarif Abdurrahman (SSA), Selasa (16/6) pagi.

Ia menjelaskan, tidak ada kejelasan terhadap asset milik Pemprov Kalbar tersebut. Diakuinya, memang benar yang menggunakan lahan itu adalah masyarakat Pontianak. Namun sejauh ini sudah diberikan peringatan keras. Karena kurang diperhatikan, kemungkinan masyarakat membangun pemukiman kembali.

Terlebih, Walikota memastikan, yang semestinya sebagai asset, namun tak dirawat dan malah dihuni masyarakat yang tak memiliki izin, justru menjadi temuan saat ada pemeriksaan.

"Kalau misalnya sewa, tidak disewakan berarti kebocoran dan akhirnya jadi temuan. Saharusnya tidak boleh, kita sudah bongkar itu. Boleh digunakan, dengan perjanjian sewa menyewa, harus bayar," tuturnya.

Menurutnya, bukan hanya asset di kawasan Kecamatan Pontianak Barat saja yang sudah dihuni masyarakat, melainkan juga di Jalan Sultan Abdurrahman. Di mana di lokasi itu sudah ada dibangun pasar. Meskipun sudah diberikan peringatan dan pembongkaran oleh Pemerintah Kota Pontianak.

"Tidak hanya itu, asset Pemprov yang kumuh lagi di Jalan Sultan Abdurrahman. Kenapa diizinkan orang jualan lapak seperti itu. Tidak boleh seperti itu, kita sudah sibuk menata, tapi dibuat kumuh lagi di situ," ucap Sutarmidji.

**Aset di Lamtoro Jeruju**

Sementara itu, Sekda Kalbar, M Zeet Hamdy Assovie menegaskan,

70 persen masalah asset Pemerintah Provinsi Kalbar telah teratasi. Menurutnya, kalau dilihat dari WTP DPP dan menjadi WTP murni sesungguhnya adanya progres penyelesaian asset yang signifikan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kalbar.

"Kalau dilihat 70 persen teratasi dan sisa 30 persen. 30 persen ini masalah aset yang terkait dengan persoalan hukum," ulasnya Sekda, Senin (15/6)

Sekda mencontohkan, seperti di Gang Lamtoro di kawasan Jeruju, Kecamatan Pontianak Barat, yakni ada sekitar 6 hektare lebih yang pemerintah daerah memberikan untuk pramuka. Namun sekarang isinya penduduk.

"Di mana penduduknya menegah ke bawah lagi masyarakatnya. Kita tidak dapat menyelesaikannya membabi buta, tapi mau bicara hak itu merupakan hak pemerintah daerah," tegasnya.

Menurutnya, di situ juga Pemkot membuat sekolah dan jalan. "Di situ ada penduduknya. Pak Midji juga buat sekolah di situ dan jalan di situ sehingga kita harus bijaksana," bebarnya.

Ia menjelaskan, kalau memang nanti hasil kajian BPK disetujui untuk dihibahkan maka Pemprov berupaya akan memberikan asset tersebut.

"Kita akan bagi rumah penduduk dan akan diberikan kepada masyarakat, yang sekolah kita berikan kepada pemerintah kota termasuk jalan," papar Sekda Kalbar.

Ia menegaskan, hal tersebut biar tidak ribut-ribut tetapi secara hukum harus dipertanggungjawabkan. "Kita juga tidak mau dianggap sebagai yang menunda-nunda asset," ucapnya.

Menurutnya, apabila mau diserahkan tanpa persetujuan BPK dan penegak hukum tidak bisa. "Kita mesti konsultasikan hal tersebut," timpalnya.

Sementara itu mengenai asset yang lainnya, pihaknya juga saat ini sedang menyelesaikan permasalahan asset tersebut.

"Mengenai di RSUD Soedarso Pontianak untuk kawasan di depan sudah beres yang kios-kios. Namun yang belakang masih dalam proses hukum," bebarnya.

Saat ini Pemprov masih menunggu apabila sudah inkrah MA dan apabila dimenangkan maka akan diambil oleh Pemprov.

**REPORTER: GUSNADI/ISFIANSYAH**

**REDAKTUR: ANDRY SOE**